



PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* DI PROVINSI BANTEN

Rakhmini Juwita

Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Terbuka

rakhmini@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to know the influence of implementation internal audit to good governance in Banten Province. The result of this research shows that internal audit implementation rendered a moderate positive influence 23.1% on good governance. Although have a very weak effect but the implementation of internal audit has a positive influence on the application of the principles of good governance, it indicates there is a tendency that the implementation of internal audit is better able to encourage good governance better.

Keywords: *Internal Audit, good governance, control*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap *good governance* di provinsi Banten. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pelaksanaan audit internal memiliki pengaruh yang moderat dan positif terhadap *good governance* sebesar 23.1%. Walaupun mempunyai pengaruh yang sangat lemah namun pelaksanaan audit internal mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerapan prinsip *good governance*, hal ini menandakan ada kecenderungan bahwa Pelaksanaan audit internal yang lebih baik mampu mendorong *good governance* yang lebih baik.

Kata kunci: *Audit internal, good governance, pengendalian*

PENDAHULUAN

Sebagian masyarakat Indonesia saat ini masih meragukan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga pemerintah harus meningkatkan *good governance* pada masyarakat Indonesia khususnya dan pada internasional umumnya. Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak beberapa tahun lalu, didahului oleh krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang meluas menjadi krisis multidimensi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk birokrasi pemerintahannya. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung

dalam tata pemerintahan yang baik (Bappenas, 2007:15). Salah satu untuk upaya meningkatkan *good governance* di Indonesia adalah dengan pelaksanaan audit internal dalam instansi pemerintah pusat maupun daerah. Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance* (SPAI,2004:9). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian "Pengaruh Audit Internal terhadap *good governance* di Propinsi Banten".

TINJAUAN LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Audit Internal

Internal audit (pemeriksaan intern) menurut Sukrisno Agoes (2004: 221) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.

Audit internal sektor publik adalah audit yang dilakukan di lingkungan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa publik (*public goods and services*), yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya, seperti jalan raya, rumah, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pertahanan dan keamanan, penerangan, dsb.(STAN, 2007:4).

Menurut Picket, (2005:41) audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam pemenuhan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi, 2) Memastikan kinerja organisasi yang efektif, 3) Memastikan komunikasi efektif dan pengendalian Informasi organisasi yang tepat, 4) Memastikan koordinasi kegiatan yang efektif antara audit eksternal dan auditor internal. Fungsi audit internal menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004) yaitu melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan resiko, pengendalian dan *governance* dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh

Menurut Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Inspektorat daerah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui : 1) Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 2) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu. 3) Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja. 4) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, dan nepotisme. 5) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004) dalam penugasan audit internal harus memperhatikan hal berikut (SPAI 2200-2600):

1. Perencanaan penugasan Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya

- (1) Sasaran penugasan Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan
 - (2) Ruang lingkup penugasan Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus menentukan ruang lingkup penugasan yang memadai
 - (3) Alokasi sumberdaya penugasan Auditor internal harus menentukan sumberdaya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf harus didasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumberdaya.
 - (4) Program kerja penugasan Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.
2. Pelaksanaan penugasan Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
- (1) Mengidentifikasi informasi Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.
 - (2) Analisis dan evaluasi Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat
 - (3) Dokumentasi informasi Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. Supervisi penugasan Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan staf
3. Komunikasi hasil penugasan Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu
- (1) Kriteria komunikasi Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya.
 - (2) Kualitas komunikasi Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu
 - (3) Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan: a). Standar yang tidak dipatuhi b). Alasan ketidakpatuhan c). Dampak dari ketidakpatuhan dalam penugasan
 - (4) Penyampaian hasil-hasil penugasan Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.
4. Pemantauan tindak lanjut Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen
- (1) Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan tindak lanjut
- Resolusi penerimaan risiko oleh manajemen Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggungjawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka penanggungjawab fungsi audit internal dan manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapatkan resolusi.

Good Governance

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik (Bappenas, 2007:15)

Menurut Bappenas (2007) penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:

- 1) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
- 2) Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel;
- 3) Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
- 5) Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Muindro (2012:12) menyatakan *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. *World bank* memberikan definisi *governance* sebagai *the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*. Sementara *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance is the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all level*.

Menurut Payaman Simanjuntak (2005) Tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal. Secara ringkas dapat diuraikan bahwa partisipasi mendorong keterlibatan dari sektor swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan penyerahan jasa dan barang kepada para pemakai. Transparansi merupakan keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Akuntansi sangat erat keterkaitannya dengan ketiga prinsip utama dari *good governance*.

Kerangka Pemikiran

Keuangan Negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang bisa dinilai dengan uang dalam kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Wujud pelaksanaan keuangan Negara tersebut dapat diidentifikasi sebagai segala bentuk kekayaan, hak dan kewajiban Negara yang tercantum dalam APBN serta laporan pelaksanaannya (Indra Bastian, 2010:42). Sehingga keuangan Negara harus dipertanggungjawabkan secara optimal kepada publik dengan cara dilaksanakan pemeriksaan sesuai dengan UU No,15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dilakukan oleh BPK, dan apabila dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan (Indra Bastian, 2010: 46). Menurut Asere (2009:20), audit internal memiliki tiga peran utama yaitu: 1. Mengevaluasi dan meningkatkan perbaikan manajemen resiko 2. Pengendalian organisasi/perusahaan 3.

Meningkatkan Proses *governance* organisasi/perusahaan. Fungsi audit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan pemerintah dan alat untuk meningkatkan kinerja di sektor publik. Pentingnya *good governance* dan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dalam penggunaan dana publik dan efisiensi dalam penyampaian layanan sehingga membutuhkan audit internal untuk membantu pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, digunakan lebih efisien dan juga efektif dalam menangani risiko manajemen (Asere, 2009:23). Menurut Payaman Simanjuntak (2005) Tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal. Secara ringkas dapat diuraikan bahwa partisipasi mendorong keterlibatan dari sektor swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan penyerahan jasa dan barang kepada para pemakai. Transparansi merupakan keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Akuntansi sangat erat keterkaitannya dengan ketiga prinsip utama dari *goodgovernance*.

Hipotesis

Semakin baik Pelaksanaan audit internal maka akan semakin baik *good governance* Publik di Propinsi Banten

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah audit internal dan *good governance*

Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah audit internal, sedangkan variabel Independen adalah *good governance*.

Adapun definisi operasionalisasi masing-masing variable adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variavel independen dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Audit Internal, untuk mengukur pelaksanaan audit internal dalam penelitian ini menggunakan standar pelaksanaan kegiatan yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (2012) (1) Perencanaan (2) Komunikasi dan Persetujuan, (3) Pengelolaan Sumber Daya, (4) Kebijakan dan Prosedur. (5) Koordinasi. (6) Pelaporan ke Pimpinan Manajemen dan Dewan,

2. Variabel Dependen (Y)

Untuk mengukur variabel *Good Governance* menggunakan tiga prinsip utama yang mendasari *good governance* oleh Payaman Simanjuntak (2005) yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Alasan pemilihan tiga prinsip, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian ini karena ketiga prinsip tersebut merupakan bagian dari penilaian indeks tata kelola pemerintah daerah yang terdapat pada *Indonesia Governance Index*. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan ketiga prinsip tersebut yang disesuaikan dengan indikator yang dikeluarkan oleh Bappenas (2009) sebagai berikut:

- (1) Transparansi; dengan indikator minimal: (a) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; (b) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.
- (2) Partisipasi; dengan indikator minimal: (a) adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; (b) adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama.

- (3) Akuntabilitas; dengan indikator minimal: (a) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; (b) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; (c) adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Sumber dan Teknik pengumpulan Data

Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada Inspektorat pemerintah daerah di lingkungan Propinsi Banten

Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis statistik regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghazali, 2011:52). Hasil uji validitas dengan teknik korelasi item-total melalui Koefisien Korelasi *Pearson* menunjukkan bahwa seluruh item teruji valid. Demikian pula hasil uji reliabilitas dengan teknik belah-dua (*split-half*) melalui Koefisien Reliabilitas *Spearman-Brown* menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel teruji reliabel. Uji validitas dilakukan terhadap item-item yang telah disusun berdasarkan konsep operasionalisasi variabel beserta indikator-indikatornya. Karena skala pengukuran dari data penelitian adalah ordinal maka untuk menghitung korelasinya digunakan data ditransformasi menjadi data interval dengan menggunakan MSI (*method successive interval*)

Tabel 1.

Hasil perhitungan uji validitas variabel implementasi audit internal (X)

No. Item	rItem-Total	thitung	ttabel	Keputusan	Kesimpulan
1.	0.533	2.081295	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
2.	0.522	2.054586	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
3.	0.682	2.664081	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
4.	0.611	2.400849	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
5.	0.682	2.671578	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
6.	0.712	2.786368	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
7.	0.551	2.166769	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
8.	0.638	2.498241	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid

				ttabel)	
9.	0.57	2.239817	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
10.	0.457	1.793281	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
11.	0.772	3.00981	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
12.	0.659	2.584171	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
13.	0.542	2.132135	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
14.	0.74	2.894147	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid
15.	0.471	1.857616	1.74588	sig. (thitung > ttabel)	Valid

Sumber: (Data Olahan)

ttabel = $t_{0,05} = 1.74588$

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item Implementasi audit internal valid. Koefisien korelasi antara skor item dengan skor total item seluruhnya positif dan signifikan. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi menggambarkan semakin tinggi derajat kevalidan item dalam mengukur variabelnya. Tampak bahwa item-item variabel memiliki nilai koefisien korelasi antara 0,457 - 0,712 dengan nilai thitung lebih besar daripada ttabel. Sehingga dengan demikian semua pernyataan dalam kuesioner untuk variabel implementasi audit internal adalah valid. Untuk itu kuesioner variabel implementasi audit internal yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Analisis uji validitas untuk pernyataan variabel implementasi prinsip *Good Governance* (Y) dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 2.

Hasil perhitungan uji validitas variabel penerapan prinsip *Good Governance* (Y)

No. Item	rItem-Total	thitung	ttabel	Keputusan	Kesimpulan
1.	0.524	3.759129	2.00758	sig. (thitung > ttabel)	Valid
2.	0.418	3.002538	2.00758	sig. (thitung > ttabel)	Valid
3.	0.465	3.338331	2.00758	sig. (thitung > ttabel)	Valid
4.	0.702	5.027908	2.00758	sig. (thitung > ttabel)	Valid
5.	0.596	4.273283	2.00758	sig. (thitung > ttabel)	Valid
7.	0.722	5.169944	2.00758	sig. (thitung > ttabel)	Valid
8.	0.555	3.980902	2.00758	sig. (thitung > ttabel)	Valid

9.	0.56	4.016141	2.00758	sig. (thitung > ttabel)	Valid
10.	0.314	2.257592	2.00758	sig. (thitung > ttabel)	Valid

Sumber: (Data Olahan)

ttabel = $t_{0,05} = 2.00758$

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item penerapan prinsip *good governance* valid. Koefisien korelasi antara skor item dengan skor total item seluruhnya positif dan signifikan. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi menggambarkan semakin tinggi derajat kevalidan item dalam mengukur variabelnya. Tampak bahwa item-item variabel memiliki nilai koefisien korelasi antara 0,471 - 0,722 dengan nilai thitung lebih besar daripada ttabel. Sehingga dengan demikian semua pernyataan dalam kuesioner untuk variabel implementasi prinsip *good governance* adalah valid. Untuk itu kuesioner variabel implementasi prinsip *good governance* yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Analisis Uji Reliabilitas

Keandalan (*reability*) suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi dimana instrument mengukur konsep dan membantu menilai "ketepatan" sebuah pengukuran (Sekaran, 2006: 40). Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kekonsistenan pernyataan yang berhubungan dengan tindakan supervisi dapat dipercaya atau diandalkan, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah *Cronbach Coefficient Alpha* yaitu suatu formula untuk mengetahui konsistensi reliabilitas internal ketika suatu skala pengukuran terdiri dari beberapa item. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut sudah reliabel, yang artinya konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Hasil perhitungan uji reliabilitas instrument penelitian

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Implementasi Audit Internal (X2)	0.752	Reliabel
Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i>	0.734	Reliabel

Sumber: (Olahan Data Lampiran)

Hasil perhitungan nilai reliabilitas pada tabel di atas memperlihatkan bahwa untuk variabel implementasi audit internal (X) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,752 dan untuk variabel implementasi prinsip *good governance* (Y) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,734. Terlihat bahwa masing masing variabel memiliki nilai koefisien reliabilitas > 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item dari adalah reliabel dan dapat diuji lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan prinsip *good governance*. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh $R = 0,481$ dengan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan audit internal (X) maka akan semakin baik pula *Good Governance* (Y). Dari nilai R pelaksanaan audit internal dan *Goodgovernance* sebesar 0.481, dan besarnya pengaruh langsung adalah 23.1% yang artinya menurut kategori Guilford pengaruh tersebut moderat. Masih ada 76.9% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X yang tidak diteliti. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan statistika dengan menggunakan SPSS

Tabel Koefesien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 ^a	.231	.235	2.75322

a. Predictors: (Constant), X

Uji hipotesis secara parsial pelaksanaan audit internal berpengaruh positif terhadap *goodgovernance* "Semakin baik pelaksanaan audit internal, maka akan semakin baik *good governance*". Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut ditemukan bahwa pelaksanaan audit internal berpengaruh positif secara parsial terhadap *good governance*. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa pelaksanaan audit internal yang lebih baik mampu mendorong *good governance* yang lebih baik. Berdasarkan kontribusi pengaruhnya terhadap *good governance*, pelaksanaan audit internal menyumbangkan pengaruh sebesar 23.1 %, (arah pengaruh positif), yang diperoleh sebagai nilai kuadrat dari $R = 0,481$. Maknanya bahwa sumbangan 23.1% variabel *goodgovernance* dijelaskan oleh variabel pelaksanaan audit internal dan sisanya (epsilon) sebesar 76.9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Menurut kategori Guilford pengaruh yang diberikan pelaksanaan audit internal ini masuk dalam kategori moderat. Pelaksanaan audit internal dapat mendorong penerapan prinsip *good governance* yang lebih baik. Walaupun mempunyai pengaruh yang sangat lemah namun pelaksanaan audit internal mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerapan prinsip *good governance*, hal ini menandakan ada kecenderungan bahwa Pelaksanaan audit internal yang lebih baik mampu mendorong *good governance* yang lebih baik.

SIMPULAN

Pelaksanaan Audit Internal mempunyai pengaruh positif sebesar 23.1% terhadap *Good Governance* di Propinsi Banten. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa pelaksanaan audit internal yang lebih baik mampu meningkatkan pelaksanaan prinsip *good governance* yang lebih baik.

Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam bidang audit internal dan *good governance*. Selain itu juga bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dan tertarik dengan judul ini ataupun ada variabel yang mungkin sama, diharapkan untuk lebih mengembangkan variabel implementasi audit internal dan penerapan prinsip *good governance* bukan hanya pada pemerintah daerah di Propinsi saja melainkan pada pemerintahan Indonesia seluruhnya.

2. .Dalam meningkatkan pelaksanaan audit internal, disarankan kepada inspektorat pemerintah daerah di Propinsi Banten untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit internal, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi kegiatan audit kepada pihak SKPD yang lebih baik dengan cara auditor harus lebih memahami karakter auditi dan pemahaman komunikasi audit.
3. Dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip *good governace*, disarankan kepada pemerintah daerah di Propinsi Banten untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip *good governance*, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman pelaksanaan proses partisipasi masyarakat dengan adanya pedoman yang jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam ikut serta menentukan keputusan kebijakan pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Asere Thomas, 2009. *Internal Auditing in the Public Sector: Promoting Good Governance and Performance Improvement*. The International Consortium on Governmental Financial Management (ICGFM) Volume IX number 1
- Bappenas, (2007). Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan Yang Baik Bappenas, Jakarta.
- Bappenas, 2007. Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kepemerintahan Yang Baik. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan Yang Baik. Jakarta
- Indra Bastian, 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta
- Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal, 2004. Standar Profesi Auditor Internal (SPAI). Jakarta
- Muindro Renyowijoyo, 2012. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Sektor Non Laba. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Payaman J, Simanjuntak (2005). Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: LPFE UI
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- STAN, (2007). Dasar-dasar Audit Internal Sektor Publik. STAN, Jakarta
- Soekrisno Agoes, 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga. Jilid II (cetakan Ke 5 2009). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta
- Spencer, Picket KH, 2005. THE ESSENTIAL HANDBOOK OF INTERNAL AUDITING. Jhon Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England. ISBN-13 978-0- 470-01316-8

